

## RESPON INDIA TERHADAP PENGEMBANGAN DESA XIAOKANG DI TIBET SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK PADA TAHUN 2022-2024

Syabella Rahema<sup>1</sup>, Dadang Ilham Kurniawan Mujiono<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Mulawarman

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis respon India terhadap pembangunan Desa Xiaokang (RRT) pada periode 2022 hingga 2024, dalam konteks sengketa perbatasan yang sedang berlangsung antara kedua negara. Pembangunan Desa Xiaokang dipahami sebagai bagian dari strategi salami slicing Tiongkok untuk memperkuat kontrol teritorialnya melalui pembangunan infrastruktur sipil dengan fungsi ganda (sipil-militer) yang potensial, sehingga menciptakan fakta baru di lapangan tanpa memicu konflik terbuka langsung yang baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan dan analisis konten, serta menerapkan kerangka teoritis deterrence by denial dan model aktor rasional untuk menjelaskan perilaku kebijakan India. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa respon India terhadap strategi “salami slicing” Tiongkok adalah mempercepat pembangunan infrastruktur perbatasan, memperkuat postur militernya, dan mengejar upaya diplomatik yang terukur. Langkah-langkah ini dianalisis melalui proses pengambilan keputusan yang dipicu oleh respon India terhadap kebijakan Tiongkok. Dari perspektif pengambilan keputusan, kebijakan India mencerminkan perhitungan rasional yang mempertimbangkan risiko geopolitik, asimetri kekuatan, dan pentingnya stabilitas regional. Studi ini juga menemukan bahwa persaingan India-Tiongkok di sepanjang perbatasan telah bergeser ke bentuk kontestasi non-konvensional yang mengintegrasikan dimensi sipil, militer, dan kebijakan domestik. Temuan ini juga memberikan pelajaran penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam merumuskan strategi pengelolaan dan pertahanan perbatasan yang adaptif dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** Desa Xiaokang, salami slicing, deterrence by denial, perbatasan India-RRT, keamanan regional, kebijakan luar negara, model aktor rasional.

### Abstract

*This study analyzes India's response to the development of Xiaokang Villages in South Tibet by the People's Republic of China (PRC) from 2022 to 2024, within the context of ongoing border disputes between the two countries. The development of Xiaokang Villages is understood as part of China's salami slicing strategy to strengthen its territorial control through the construction of civilian infrastructure with potential dual-use (civil-military) functions, thereby creating new facts on the ground without provoking a new direct open conflict. This research employs a descriptive qualitative approach using library research and content analysis, and applies the theoretical frameworks of deterrence by denial and the*

*rational actor model to explain India's policy behavior. This research finding indicates that India's response to China's salami-slicing is to accelerate border infrastructure development, strengthen its military posture, and pursue measured diplomatic efforts. These measures are analyzed through the decision-making process, which was initiated by India's response to China's policy. From a decision-making perspective, India's policies reflect rational calculations that take into account geopolitical risks, power asymmetry, and the importance of regional stability. This study further found that India-China competition along the border has shifted toward a form of non-conventional contestation that integrates civilian, military, and domestic policy dimensions. These findings also offer important lessons for other countries, including Indonesia, in formulating adaptive and sustainable border management and defense strategies.*

**Keywords :** *Xiaokang village, salami slicing, deterrence by denial, India's response, India-PRC border, regional security, foreign policy, Rational Actor Model.*

## 1. PENDAHULUAN

Dinamika perbatasan antarnegara merupakan salah satu aspek krusial dalam studi hubungan internasional yang sering mencerminkan persaingan geopolitik dan klaim kedaulatan. Salah satu strategi yang berpengaruh adalah pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan yang disengketakan, terutama memiliki potensi penggunaan ganda/*dual-use* (sipil dan militer). Strategi ini dikenal sebagai *salami slicing*, yaitu rangkaian langkah kecil berkelanjutan untuk mengubah *status quo* dan memperluas wilayah secara bertahap tanpa memicu eskalasi militer besar (Japneet, et al., 2025). Dalam konteks ini, RRT telah mengimplementasikan inisiatif pengembangan desa di Daerah Otonomi Tibet yang dikenal sebagai Desa Xiaokang atau "*well-off border village*" (Jun & Hart, 2024).

Sejak 2010 hingga 2017, *salami slicing* mulai banyak diterapkan oleh RRT dengan mempercepat pengembangan infrastruktur bernilai strategi, disertai penempatan militer yang tidak mencolok. Dalam penelitian ini, fenomena pengembangan infrastruktur perbatasan dengan potensi *dual-use*, serta strategi *salami slicing*, tidak terbatas pada kasus India-RRT; pola serupa juga terjadi di negara-negara lain yang mengalami sengketa teritorial.

Sengketa perbatasan India-RRT cukup kompleks karena melibatkan ambiguitas sejarah dan hukum terkait garis batas yang belum disepakati secara sah. India mewarisi Garis McMahon dari Konvensi Simla 1914, namun RRT menolak

legalitasnya, sehingga muncul istilah *Line of Actual Control* (LAC) sebagai batas de facto. Ketegangan ini mencapai titik kritis pasca-bentrokan di Lembah Galwan tahun 2020 (Al Jazeera, 2024).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana RRT dalam melakukan konsolidasi kekuasaan dan perluasan kontrol wilayah secara bertahap, termasuk respon India yang terancam dengan berkurangnya wilayah kedaulatannya, serta implikasi strategi tersebut sebagai pelajaran penting bagi negara-negara yang bersengketa, termasuk Indonesia, dalam menjaga kedaulatan dan merumuskan kebijakan perbatasan yang lebih adaptif.

Dengan itu, penulis mengajukan pertanyaan penelitian “Bagaimana respon India terhadap pengembangan Desa Xiaokang oleh Republik Rakyat Tiongkok di Tibet Selatan pada tahun 2022-2024?”. Berfokus pada mengetahui bagaimana respon India terhadap pengembangan Desa Xiaokang dan bagaimana pengembangan Desa Xiaokang berfungsi sebagai strategi *salami slicing* untuk memperkuat kontrol RRT di sepanjang perbatasan India.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam makna kebijakan dan pertimbangan para pengambil keputusan India. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui metode studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan informasi dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga riset seperti CSIS ChinaPower dan *International Crisis Group*, serta artikel ilmiah (Creswell & Creswell, 2018). Teknik analisis data menggunakan *content analysis* yang dipandu oleh kerangka konseptual *deterrence by denial* dan *Rational Actor Model* (RAM).

## 3. Dinamika Pengembangan Desa Xiaokang

Penelitian ini berfokus pada perbatasan India-RRT di kawasan Tibet Selatan (versi RRT) yang berbatasan dengan Arunachal Pradesh sebagai “Zangnan” dan tidak mengakui klaim kedaulatan India di wilayah tersebut (Parischa, 2021). Sebaliknya, India berpegang pada Garis McMahon 1914 yang tidak diakui RRT (setara tingkat

desa di bawah kecamatan). Nama resminya dalam bahasa Mandarin adalah “*bianjing xiaokang cun*” yang berarti “*well-off border villages*”. Dengan kata lain, istilah “Desa Xiaokang” merujuk pada kumpulan desa perbatasan yang pengembangannya dipandang sebagai simbol kemakmuran kontrol teritorial RRT.

Program Desa Xiaokang dicanangkan RRT untuk memakmurkan kawasan perbatasan sekaligus menempatkan populasi sipil loyal sebagai manifestasi klaim kedaulatan. Hingga akhir 2021, RRT telah mengalokasikan sekitar USD 6,4 miliar untuk membangun ratusan desa perbatasan di Tibet. Citra satelit di Desa Zhuangnan dan Majiduncun menunjukkan adanya fasilitas penggunaan ganda (*dual-use*) seperti abrak militer, menara komunikasi, dan helipad, yang meningkatkan kemampuan proyeksi militer PLA (Jun & Hart, 2024). Langkah ini sejalan dengan strategi *Military-Civil Fusion* RRT yang memanfaatkan komunitas sipil sebagai komponen pertahanan perbatasan.

### **Strategi *Deterrence by Denial* India**

India merespon manuver RRT dengan menerapkan strategi *deterrence by denial*, yaitu memperkuat pertahanan demikian rupa sehingga lawan yakin bahwa agresi tidak akan berhasil (Snyder, 1961). Respon India mencakup tiga ranah utama :

- 1. Pengembangan Infrastruktur Sipil-Militer:** India meluncurkan *Vibrant Village Programme* (VVP) pada 15 Februari 2023 dengan anggaran USD 600 juta untuk mencegah depopulasi di perbatasan dan memperkuat Terowongan Sela dipercepat untuk memastikan akses logistik ke wilayah Tawang sepanjang tahun.
- 2. Penguatan Postur Militer:** India menambahkan sekitar 50.000-60.000 personal di sepanjang LAC pasca-2020 (Asia Report, 2023). Anggaran pertahanan India juga meningkat menjadi USD 83 miliar pada 2023 untuk mendukung doktrin *forward posture* (SIPRI, 2024).
- 3. Penguatan Langkah Diplomasi :** India secara konsisten menolak klaim sepihak RRT atas penamaan wilayah di Arunachal Pradesh dan memperkuat kerja sama melalui forum QUAD dan dialog WMCC.

### **Analisis Kebijakan Melalui *Rational Actor Model* (RAM)**

Melalui konsep RAM, India dipandang sebagai aktor tunggal (*unitary actor*) yang membuat pilihan rasional untuk memaksimalkan kepentingan nasional (Allison, 1971). India memilih opsi *deterrence by denial* karena dianggap sebagai jalan tengah yang efektif: menahan ekspansi lawan tanpa harus memicu perang nuklir yang bersifat katastrofe. Keputusan ini menunjukkan kalkulasi biaya-manfaat yang cermat, di mana India menyeimbangkan pertahanan internal dengan penyeimbang eksternal (*external balancing*) melalui kemitraan strategis.

Pendekatan India mengindikasikan penerapan *deterrence by denial*. Alih-alih ancaman hukuman, India fokus menghilangkan efek positif dari pengembangan RRT. Misalnya, dengan infrastruktur yang lebih baik di pihak India, jalan RRT tidak lagi menggeser keseimbangan militernya. Kebijakan ini didukung peningkatan sinergi antar-instansi pertahanan dan kementerian luar negeri India untuk memastikan kebijakan yang koheren. Dalam kerangka Model Aktor Rasional, setiap kebijakan dipilih setelah menilai biaya-manfaatnya : opsi tidak bertindak/tidak melakukan apapun dianggap menguntungkan RRT, sementara opsi agresi militer dipandang akan terlalu mahal. Hasilnya, kebijakan India menggambarkan perhitungan rasional untuk menjaga status quo perbatasan sekaligus mempertahankan kredibilitas defensif.

Persaingan India-RRT di perbatasan kini lebih menekankan kontestasi non-konvensional, di mana pembangunan sipil (*soft power*), kekuatan militer (*hard power*), dan pengaruh politik domestik saling terkait. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam menanggapi tantangan sengketa perbatasan. Strategi adaptif dan berkelanjutan, yang menggabungkan aspek militernya dengan pembangunan infrastruktur dan diplomasi, menjadi pelajaran kunci. Peneliti menyimpulkan bahwa langkah-langkah defensif India berhasil menstabilkan situasi jangka pendek; namun, efektivitas jangka panjang memerlukan konsistensi kebijakan dan kewaspadaan terhadap langkah-langkah lanjutan RRT.

Ketiga langkah tersebut dianalisis melalui kerangka *decision making* : India melihat pembangunan sipil RRT sebagai ancaman nyata, lalu memilih strategi

penangkalan (*deterrence by denial*) daripada balasan militer secara langsung. Langkah-langkah defensif ini dimaksudkan mencegah RRT memperoleh keuntungan strategis lebih lanjut, sesuai logika model aktor rasional.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji respon India terhadap pengembangan Desa Xioakang oleh RRT (2022-2024) menggunakan kerangka konseptual *deterrence by denial* dan model aktor rasional. Pengembangan masif Desa Xiaokang merupakan bagian dari strategi *salami slicing* RRT untuk memperkuat klaim teritorial di sepanjang perbatasan. Menjawab rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa India merespon ancaman secara defensif dan komprehensif dengan mengintensifkan pembangunan infrastruktur perbatasan, memperkuat kekuatan militer, serta memanfaatkan jalur diplomasi. Respon ini menekankan penangkalan (*deterrence by denial*) untuk meniadakan keuntungan musuh daripada konfrontasi terbuka.

Tindakan India mencerminkan perhitungan rasional sesuai model aktor rasional yaitu pemerintah mempertimbangkan risiko geopolitik, ketidakseimbangan kekuatan, dan kebutuhan stabilitas regional dalam merumuskan kebijakan. Dalam jangka pendek, strategi ini berhasil memantapkan kendali India atas LAC setelah peningkatan agresi RRT. Namun, keberlanjutan efektivitasnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan adaptasi terhadap kebijakan baru Beijing. Studi ini menegaskan bahwa persaingan regional kini melibatkan dimensi sipil, militer, dan politik domestik secara terintegrasi. Oleh karena itu, temuan ini memiliki implikasi penting bagi strategi pertahanan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia, untuk membangun pertahanan perbatasan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

---

## REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

- Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Little, Brown and Company.
- Allison, G. T., & Zelikow, P. (1999). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (2nd ed.). Longman.
- Avant, D. D., et al. (2008). *Security Studies: An Introduction*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage.
- Freedman, L. (2004). *Deterrence*. Polity Press.
- Kahn, H. (1962). *Thinking about the Unthinkable*. Horizon Press.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton.
- Mintz, A., & DeRouen, K. R. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press.
- Morgan, P. M. (1983). *Deterrence: A Conceptual Analysis* (2nd ed.). Sage.
- Morgenthau, H. J. (1960). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (3rd ed.). Alfred A. Knopf.
- Schelling, T. C. (1966). *Arms and Influence*. Yale University Press.
- And, D., & Security, G. (2024). Efek deterrence nuklir Korea Utara bagi keamanan di Asia Timur. *Jurnal Mahasiswa Magister HI*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2856>
- Brodie, B. (1959). The anatomy of deterrence. *World Politics*, 11(2), 173–191.
- Huth, P. K., & Russett, B. M. (1988). Deterrence failure and crisis escalation. *International Studies Quarterly*, 32(1), 29–45.
- Verma, R. (2024). India–China rivalry, border dispute, border standoffs, and crises. *Journal of Strategic Studies*, 47(3). <https://doi.org/10.1080/14736489.2024.2423996>

Adil, A. (2022, Juni 9). India berhasil uji coba rudal balistik Agni-4 berkekuatan nuklir. *Anadolu Agency*. <https://www.aa.com.tr/id//2607313>

Al Jazeera. (2020, 10 September). *Mapping India and China's disputed borders*. <https://interactive.aljazeera.com/>

Al Jazeera. (2024, 22 Oktober). *How India and China pulled back from a border war – and why now*. <https://www.aljazeera.com>

Arunachal Pradesh Space Application Center. (2024). *Arunachal Pradesh state map*. <https://diprarunachal.org/.../Arunachal-Pradesh-State-Map.pdf>

BNPP RI. (2025). *Penguatan PLBN Searasan sebagai beranda terdepan negara*. <https://bnpp.go.id/penguatan-plbn-serasan>

Crisis Group Asia. (2023). *Thin ice in the Himalayas: Handling the India–China border dispute*. <https://www.crisisgroup.org/asia/334-thin-ice-himalayas-handling-india-china-border-dispute>

Deepak, B. R. (2025, 16 Maret). *China's anxiety over India's border development*. *The Sunday Guardian*. <https://sundayguardianlive.com/>